

Puluhan Tahun Rusak, Irna Narulita Monitor Pembangunan Jalan Cibitung

PANDEGLANG (IM)- Bupati Pandeglang, Irna Narulita melaksanakan monitoring proyek pembangunan jalan Cibitung-Lebak, Kecamatan Munjul, sepanjang 4,5 kilometer bersumber dari DAK tahun Anggaran 2023. Proyek pembangunan Jalan Cibitung-Lebak merupakan salah satu jalan hasil dari aspirasi Anggota DPR RI, Rizki Natakusumah dalam rangka merealisasikan aspirasi masyarakat serta mendukung program Jalan Kabupaten Mantap Betul (Jakamantul) di Kabupaten Pandeglang. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, jalan Cibitung-Lebak merupakan hasil aspirasi dan Anggota DPR RI. "Tbu bersyukur masyarakat sudah mengusulkan jalan ini sepanjang 4,5 KM. Jadi, ada tiga ruas yang sudah kita tuntaskan salah satunya adalah Cibitung-Lebak ini," katanya usai melaksanakan monitor pembangunan Jalan Cibitung-Lebak, Selasa (16/5).

Hasil dari aspirasi Rizki Natakusumah, selaku anggota Komisi I Badan Anggaran DPR RI yang telah membawa anggaran dari pusat untuk pembangunan jalan di Kabupaten Pandeglang. "Jalannya dibangun, responnya masyarakat sangat baik. Tadi masyarakat sangat happy di mana

sudah harapan mereka puluhan tahun dulu tidak bisa dilewati (rusak berat) sekarang bisa dilewati," katanya.

Akses jalan sudah bisa dilewati setelah dilaksanakan pengerjaan jalan beton dari 4,5 kilometer sepanjang 3,5 kilometer sudah selesai. Sisanya masih dalam tahap pengerjaan. "Nah saya mau mengontrol, saya monitor baru 3,5 kilometer yang baru terbangun. Jadi ini harus dikontrol tidak oleh kita saja tapi masyarakat harus ikut serta memonitor kualitas daripada pembangunan betonisasi karena ini usianya harus bisa bertahan 15 sampai 25 tahun ke depannya," katanya.

Irna mengungkapkan, ketebalan beton jalan minimal harus 25 centimeter. Jadi harus turut diawasi sebelum PHO (Provisional Hand Over-PHO atau serah terima sementara pekerjaan. "Jadi nanti harus digelar dan juga harus diukur lagi lalu sampai dengan nanti digelar dengan betonisasi ya minimal harus 25 centimeter ketebalannya. Sebelum PHO maka tidak hanya kami yang mengawasi tetapi masyarakat juga," katanya. ● **pra**

PPP BERHARAP KASUSNYA DISELESAIKAN SECARA PERDATA

Oknum DPRD Kabupaten Bogor EK Kembalikan Kerugian Pelapor

GUNUNG SINDUR (IM)- Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor Usep Supratman berharap laporan dugaan tindak pidana penipuan oknum DPRD Kabupaten Bogor berisial EK bisa diselesaikan secara perdata. Hal itu karena oknum DPRD Kabupaten Bogor berisial EK sudah mau mengembalikan kerugian pihak pelapor dengan melepaskan hak akan tanah miliknya. "Mudah-mudahan bisa beres, karena persoalan ini berawal secara perdata dan bukannya pidana. Apalagi terlapor (oknum DPRD Kabupaten Bogor berisial EK) sudah mau menyerahkan tanah miliknya sebagai ganti rugi," kata Usep Supratman kepada wartawan, Selasa (16/5).

Usep juga meminta jangan hanya EK saja yang diramaikan dalam pemberitaan, sementara kasus yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Bogor lainnya tidak ramai beritanya. "Jangan ketika EK ramai beritanya, sementara lain-lainnya diam-diam. Anggota Fraksi PPP juga ada yang duduk di Badan

Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kabupaten Bogor hingga tau siapa saja rekan kami yang diadukan atau dilaporin ke BKD," pintanya. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor ini melanjutkan, bahwa EK yang saat ini statusnya masih terlapor masuk ke dalam daftar bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Bogor dalam ajang Pileg 2024 mendatang.

Sementara itu, sumber dari pihak pelapor yang tak mau disebutkan namanya menyebutkan bahwa pihak perusahaan terus mendorong agar pihak kepolisian benar-benar menempatkan hukum di atas segalanya. "Menurut saya tidak ada unsur perdata dengan bukti-bukti yang ada itu merupakan perkara pidana. Hingga kami mendorong pihak Kepolisian benar-benar menempatkan hukum diatas segalanya," ucapnya.

Ia menjelaskan alasan pihak pelapor menolak perdamaian karena EK terus wanprestasi kurang lebih selama 2 tahun, di mana tidak ada janji oknum dewan tersebut yang ditepati. ● **pp**

IDN/ANTARA



UJI EMISI GRATIS DI BANDUNG

Petugas melakukan uji emisi pada sebuah kendaraan dinas di Samsat Kawalayaan, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/5). Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bekerja sama dengan Asosiasi Bengkel Indonesia menggelar uji emisi kendaraan roda empat secara gratis guna mengetahui tingkat efisiensi pembakaran dalam mesin kendaraan serta mewujudkan program langit biru Kota Bandung.

Jateng Jadi Provinsi Terbaik

JAKARTA (IM)- Sejumlah daerah dianugerahi penghargaan Pembangunan Daerah oleh Bappenas Jawa Tengah didapat menjadi provinsi terbaik. Penghargaan Pembangunan Daerah 2023 ini diberikan Bappenas dalam acara Indonesia Emas 2045 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (16/5). Dalam gelaran ini juga dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Berikut daftar peraih penghargaan: Provinsi Terbaik: 1. Jawa Tengah 2. Sumatera Selatan 3. Jawa Barat.

Jawa Tengah didaulat menjadi provinsi terbaik karena capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya lebih baik. Capaian itu disebut diperoleh melalui kebijakan prioritas daerah pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta kualitas pembangunan

perempuan dan anak.

Selain itu, RKPD yang komprehensif dan konsistensi antara hasil evaluasi dengan isu strategis daerah juga menjadi salah satu faktor Jawa Tengah dipilih menjadi provinsi terbaik.

Kabupaten Terbaik: 1. Temanggung 2. Aceh Barat 3. Garut.

Kota Terbaik: 1. Sukabumi 2. Palu 3. Semarang Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun mengapresiasi pemerintah daerah yang memperoleh Penghargaan Pembangunan Daerah. Ma'ruf berpesan agar pemda-pemda tersebut menjadi provinsi terbaik karena capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya lebih baik. Capaian itu disebut diperoleh melalui kebijakan prioritas daerah pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta kualitas pembangunan

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

EXPO PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI

Peserta memperlihatkan produk 3D berupa mainan pada Expo Pendidikan di Taman Jambansari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (16/5). Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis menggelar expo pendidikan di bidang sains dan teknologi, bertujuan untuk mawadahi kreativitas yang inovatif dari siswa dan guru dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Imbau Kontraktor Kembalikan Kerugian Negara

Dari informasi yang dihimpun, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, 12 kontraktor diharuskan mengembalikan uang kerugian negara dengan total nilai lebih dari Rp5 miliar.

CIBINONG (IM)- Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Rhoveo Checanova mengimbau 2 penyedia jasa atau kontraktor yang belum mengembalikan

kerugian negara untuk segera membenahi persoalannya.

Dari informasi yang dihimpun, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Perwakilan Jawa Barat, 12 kontraktor diharuskan mengembalikan uang kerugian dengan total nilai lebih dari Rp5 miliar.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor mendapatkan catatan BPK Perwakilan Jawa Barat agar kontraktor rekanannya mengembalikan dugaan kerugian negara dengan total Rp13 miliar. Namun, sejauh ini baru bisa diselesaikan sebesar Rp8 miliar, hingga tersisa Rp5 miliar lagi.

"Saya mengimbau agar para kontraktor mengembalikan dugaan kerugian negara,

karena itu sebuah kewajiban," ujar Ferry Rhoveo Checanova kepada wartawan, Senin kemarin.

Ferry menuturkan, jika tidak dikembalikan maka para kontraktor bisa dikenakan sanksi tegas minimal oleh Inspektorat Kabupaten Bogor maupun BPK-RI Perwakilan Jawa Barat. "Mungkin para kontraktor sedang tidak memiliki uang, namun tetap harus mengembalikan uang dugaan kerugian negara tersebut," tutur politisi PPP tersebut.

Terkait, organisasi wadah penyedia jasa tempat beruang, ia menjelaskan bahwa organisasi tidak bisa berbuat

banyak jika ada anggotanya yang bermasalah.

"Jikapun ada pinjaman uang kepada 12 kontraktor tersebut agar permasalahannya selesai, itu pun sifatnya pribadi," ucap Vio sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, bahwa hingga saat ini dirinya belum membaca LHP BPK Perwakilan Jawa Barat atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor di Tahun 2021 lalu. "Saya belum membaca LHP BPK (terkait temuan pada 12 kontraktor tersebut), hingga belum bisa berkomentar secara detail," jelasnya. ● **gio**

Qori Kabupaten Bogor Jadi Terbaik di Jawa Barat

BOGOR (IM)- Qori asal Kabupaten Bogor, Muhammad Reza Maulana Nurdin menjadi yang terbaik di Jawa Barat, setelah berhasil menjadi juara pertama pada cabang Tilawah Dewasa Putra.

Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) ke-18 Tingkat Jawa Barat, digelar di Plaza Pusdati Jawa Barat, Kota Bandung, Sabtu (13/5).

Muhammad Reza Maulana Nurdin merupakan putra kebanggaan Kabupaten Bogor yang memiliki banyak prestasi di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Di tingkat nasional dirinya beberapa kali meraih juara pada kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Selanjutnya pada tahun 2021, ia menjadi finalis MTQ internasional di Qatar.

Ketua ILembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Bogor, Jalaludin Al Mahli mengungkapkan terima kasihnya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor atas dukungan yang diberikan selama ini. Kemudian tentunya kepada seluruh peserta yang sudah berjuang dan memersempatkan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor.

"Saya juga berterima kasih kepada seluruh jajaran pengurus LPTQ Kabupaten Bogor, para pembina, dan para official yang telah melakukan kerja kerasnya hingga hari ini.

Semoga perwakilan Kabupaten Bogor bisa kembali berkiprah di tingkat nasional dan meraih juara," ungkap Jalaludin.

Ia berharap, ke depan dalam proses pengembangan tilawatil Quran di Kabupaten Bogor semakin bersinergi dan memberikan prestasi yang unggul sesuai Karsa Bogor Berkeadaban. "Pola pembinaan akan terus kita tingkatkan, terutama dalam menghadapi perlombaan di tingkat nasional. Kabupaten Bogor menjadi salah satu kabupaten yang diperhitungkan bagi Jawa Barat untuk mengikuti ajang di tingkat nasional," ujar Jalaludin Al Mahli.

Menutup kegiatan STQH ke-18 tingkat Jawa Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspekstra) Provinsi Jawa Barat, yang juga Ketua LPTQ Jawa Barat, Dedi Supandi menyatakan, bersyukur dapat menyelesaikan rangkaian kegiatan STQH ke-18 tingkat Provinsi Jawa Barat, sehingga perhelatan ini dapat memberikan keberkahan dan kontribusi sebagai provinsi terdepan dalam pembangunan bidang keagamaan.

"STQH ini adalah wujud meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Al Quran dan Hadits. Ini juga bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi terdepan dalam pembangunan bidang

keagamaan. Serta melaksanakan visi Jawa Barat yang juara lahir dan batin," jelasnya.

Dedi berharap, semoga penyelenggaraan ini pula dapat menorehkan prestasi di tingkat nasional. Para pemenang yang akan mewakili Jawa Barat ini dapat menorehkan juara di tingkat nasional.

Bagi para pemenang STQH ke-18 tingkat Jawa Barat, beriklanlah teladan di daerah masing-masing, terus amalkan syariat Al Quran dan Hadits.

Sementara itu, putra-putri kebanggaan Kabupaten Bogor lainnya yang turut menorehkan prestasi pada STQH ke-18 Tingkat Jawa Barat di antaranya, Dede Siti Sarah, juara 2 cabang Tilawah Dewasa Putri. Khairul Azam Agung Setiawan, juara 2 cabang 10 Juz Putra. Nailah Imaniyah, juara 3 cabang Tilawah Anak Putri. Siti Nuriyah, juara harapan 2 cabang 20 Juz Putri. Ahmad Syarofi Nasution, juara harapan 2 cabang Tilawah Anak Putra. Shahka Khalid juara harapan 2 cabang Tafsir Al Quran Bahasa Arab Putra.

STQH ke-18 tingkat Jawa Barat berlangsung selama tujuh hari sejak tanggal 7 hingga 13 Mei 2023. Ajang tersebut diikuti 460 peserta perwakilan kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Pemkab Bogor mengizinkan sebanyak 16 orang peserta, pemenang pada STQH ini akan mewakili Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional. ● **gio**



IST

Qori Kabupaten Bogor, Muhammad Reza Maulana Nurdin menjadi yang terbaik di Jawa Barat.

Bulan Depan, Tilang Manual Kembali Diberlakukan di Jabar

BANDUNG (IM)- Polda Jabar dan Polres jajarannya akan kembali menerapkan tilang manual di wilayah hukum Jawa Barat bagi pelanggar lalu lintas.

Penerapan kembali tilang manual bagi pelanggar lalu lintas dilakukan Polda Jabar dan Polres jajarannya terhitung dari 1 Juni 2023 atau bulan depan.

Diberlakukannya kembali tilang manual di Jabar dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo.

"Akan diberlakukan (tilang manual) 1 Juni," kata dia melalui pesan singkat pada Selasa (16/5).

Ibrahim menambahkan, penerapan tilang manual akan diberlakukan di 27 kabupaten dan kota di Jabar. Penerapan tilang manual kbal dilakukan untuk menekan pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi setelah tilang manual di non-aktifkan "Di seluruh Jabar," ucap dia.

Sebelumnya, Kapolri

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan aturan untuk jajaran polisi lalulintas agar tidak melakukan tilang secara manual.

Larangan tilang manual yang ditujukan bagi Polantas itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kaskorlantas Polri Irjen Firman Shanty-abudi atas nama Kapolri.

Dalam instruksi itu, jajaran Polantas diminta untuk mengedepankan atau memaksimalkan penindakan melalui tilang elektronik atau ETLT baik statis maupun mobile. Adapun larangan menggunakan tilang manual tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Polri pada 14 Oktober 2022 lalu.

Untuk memaksimalkan hal itu, Korlantas Polri mengklaim pihaknya kini sudah menyiapkan ribuan kamera ETLT yang tersebar di seluruh Indonesia. ● **pra**

4.460 Calon Jamaah Jabar Belum Lunasi Biaya Haji

BANDUNG (IM)- Jamaah haji asal Jabar masih banyak yang belum melunasi biaya haji. Ada sebanyak 4.460 calon jamaah belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat (Kanwil Kemenag Jabar), Ajam Mustajam, berdasarkan data total kuota calon jamaah haji asal Jabar adalah 38.296 orang. Sedangkan, total kuota cadangan calon jamaah haji asal Jawa Barat 11.617 orang.

"Hingga saat ini total calon jamaah haji murni/regular yang sudah melunasi ialah sebanyak 33.866 orang," ujar Ajam pada Diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol) Edisi VI "Pemerintah Teratur, Ibadah Haji 2023 Insha Allah Mabru", yang diadakan oleh PWI Pokja Gedung Sate Bandung, Selasa (16/5).

Menurut Ajam, karena cukup banyak jamaah haji yang belum melunasi, maka untuk pelunasan biaya haji pihaknya memperpanjang sampai

tanggal 19 Mei 2023. "Progres sampai saat ini ada penambahan 200 orang yang melunasi. Total yang belum melunasi ada 4.460 orang," katanya.

Ajam khawatir, jika hingga perpanjangan waktu yang ditentukan calon jamaah haji regular asal Jawa Barat belum juga melunasi biaya hajinya maka kuota yang tersisa akan diberikan kepada kuota nasional atau daerah lain. "Kalau nanti banyak calon jamaah haji regular yang tidak bisa melunasi biaya haji, kami malah khawatir akan berdampak pada penentuan kuota selanjutnya," katanya.

Ajam menjelaskan, penetapan kuota calon jamaah haji didasarkan pada prinsip azas keadilan sehingga daftar tunggu haji di wilayah Jawa Barat, perbedaannya tidak terlalu mencolok di setiap kabupaten/kota.

"Paling yang perbedaan itu hanya sampai satu hingga dua tahun, tidak sampai hingga belasan tahun. Karena prinsipnya kuota haji itu dihitung dari jumlah penduduk," katanya. ● **pra**